

Katalog BPS : 3205008. 76

Statistik KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2011

<http://sulbar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

**Statistik Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2011**

<http://sulbarbps.go.id>

**Statistik Kemiskinan
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2011**

No. Publikasi	: 76520.1201
Nomor Katalog	: 3205008.76
Ukuran Publikasi	: 17 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: vii + 49 Halaman
Naskah	: Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Gambar Kulit	: Bidang IPDS
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Barat
Dicetak Oleh	: Mandiri Art

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

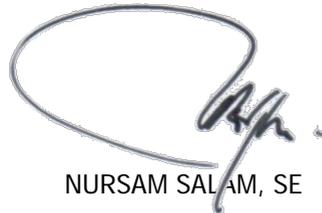
Publikasi Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 merupakan publikasi pertama mengenai kemiskinan dan akan diterbitkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010 dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011. Selain itu, dalam publikasi ini juga menggambarkan profil rumah tangga miskin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang ditinjau dari karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan tempat tinggal (perumahan).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan para konsumen data kemiskinan secara optimal, BPS Provinsi Sulawesi Barat akan berupaya menyajikan data kemiskinan secara berkelanjutan. Pada penerbitan kali ini kami menyadari masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi ini di masa yang akan datang.

Mamuju, Juli 2012

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat



NURSAM SALAM, SE

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
1.5. Konsep dan Definisi	4
1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan	5
BAB II PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2006-2011	10
2.1. Garis Kemiskinan	10
2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	11
2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	13
2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	15

BAB III	PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2006-2010.....	18
	3.1. Garis Kemiskinan	18
	3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	19
	3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	21
	3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	22
BAB IV	PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI DI PULAU SULAWESI TAHUN 2006-2011.....	24
	4.1. Garis Kemiskinan	24
	4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	25
	4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	27
	4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	28
BAB V	PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011.....	30
	5.1. Karakteristik Sosial Demografi.....	30
	5.2. Karakteristik Pendidikan.....	33
	5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan.....	35
	5.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal).....	38

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Komponennya Tahun 2007-2011.....	11
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	13
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	14
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	16
5	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Tahun 2006-2010.....	18
6	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010.....	19
7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010.....	20
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010.....	22
9	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010.....	23
10	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011.....	24
11	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011.....	25
12	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011.....	26
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011.....	27

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
14	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011.....	28
15	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah Tahun 2011.....	31
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2011.....	32
17	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga Tahun 2011.....	33
18	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2011.....	34
19	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Ruman Tangga Tahun 2011.....	36
20	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2011.....	37
21	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m ²) Tahun 2011.....	38
22	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2011.....	40
23	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas Tahun 2011.....	41
24	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2011.....	42
25	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah Tahun 2011.....	44

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
26	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga Tahun 2011.....	45
27	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban Tahun 2011.....	47
28	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Tahun 2011.....	48

<http://sulbar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	10
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2011.....	12
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	15
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2006-2011.....	17

<http://sulbar.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang menarik dibicarakan bagi semua kalangan, baik politisi, budayawan, LSM, maupun praktisi bidang keilmuan lainnya. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang mendasar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data dan jumlah persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal itu bisa terwujud karena BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup analisis perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada kondisi 2006-2011, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010 dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011. Selain itu, disajikan pula profil rumah tangga miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 yang dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan ditinjau dari karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan tempat tinggal (perumahan).

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian publikasi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup, sumber data, sistematika penulisan, konsep dan definisi serta metode penghitungan kemiskinan.
2. Bab II. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
3. Bab III. Perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2010 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
4. Bab IV. Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2006-2011 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
5. Bab V. Profil rumah tangga miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 berisi karakteristik sosial demografi, pendidikan,

ketenagakerjaan, dan tempat tinggal (perumahan).

1.5. Konsep Dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Kemiskinan BPS
 - Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)
 - " Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)"
2. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
3. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
4. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
5. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
7. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk

referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Dimana :

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi ke-p

Teknik penghitungan GKNM

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub

kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

- Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004) dan daerah j (kota/desa)

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana :

$\%PM_p$ = % penduduk miskin di provinsi p

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p

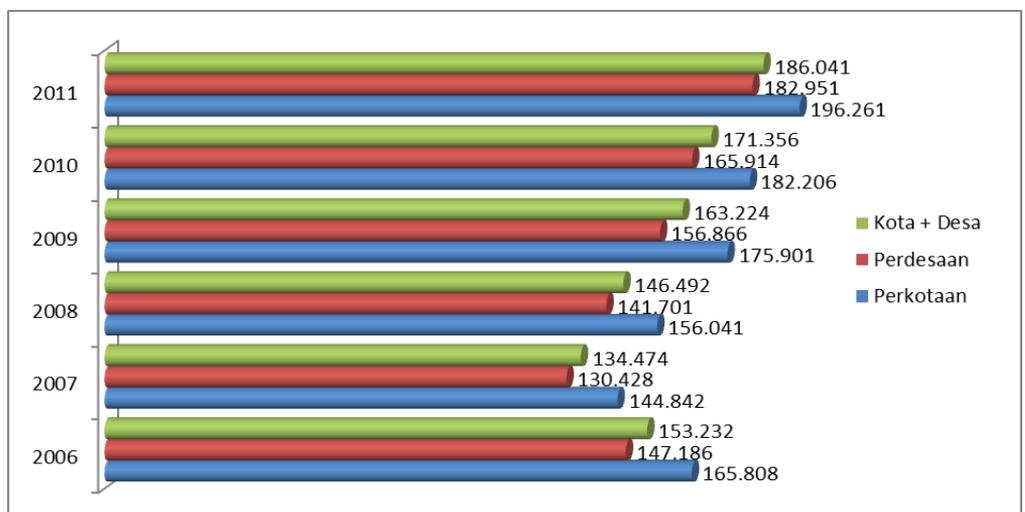
BAB II PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2006 – 2011

Perubahan tingkat kemiskinan selama lima tahun dapat dilihat melalui Analisis Tren tingkat kemiskinan antara kondisi Tahun 2006 – 2011. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pada periode 2006 – 2007 mengalami penurunan baik untuk daerah perdesaan maupun perkotaan dimana garis kemiskinan pada tahun 2006 sebesar Rp. 153.232,- per kapita per bulan menjadi Rp. 134.474,- per kapita per bulan pada tahun 2007. Akan tetapi, pada tahun 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan sebesar 38,35 persen atau Rp. 51.567,- per kapita per bulan. Keadaan yang sama juga terjadi di daerah perdesaan dan perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 40,27 persen dan 35,50 persen.

Gambar 1
Garis Kemiskinan Menurut Daerah
Tahun 2006 – 2011
(Rp/Kapita/Bln)



Jika dilihat dari komponennya, terlihat bahwa garis kemiskinan makanan memiliki pengaruh sangat besar yaitu sebesar 80 persen dalam membentuk garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan non makanan hanya sekitar 20 persen.

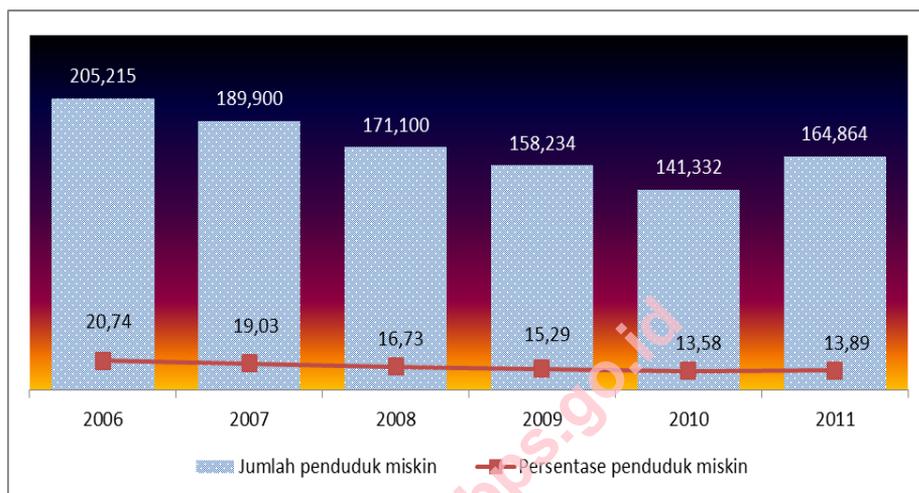
Tabel 1
Garis Kemiskinan Menurut Komponennya
Tahun 2007 – 2011

Tahun	Makanan (GKM)	Non Makanan (GKNM)	Jumlah (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	110.275	24.199	134.474
2008	120.838	25.654	146.492
2009	133.679	29.545	163.224
2010	140.521	30.835	171.356
2011	149.894	36.147	186.041

2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2006 – 2010 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 205.215 jiwa (20,74 persen) pada tahun 2006 menjadi 141.332 jiwa (13,58 persen) pada tahun 2010. Akan tetapi, pada periode 2010 – 2011 mengalami sedikit kenaikan sebesar 23.532 jiwa (0,31 persen).

Gambar 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2006 – 2011



Jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 di daerah perkotaan sebesar 29.679 jiwa (10,77 persen) dan daerah perdesaan sebesar 135.185 jiwa (14,83 persen).

Selama periode 2006-2011, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2006-2010 cenderung menurun, namun pada tahun 2011 meningkat sebesar 1,07 persen dibanding periode sebelumnya. Akan tetapi, dilihat dari nilai absolut, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan pada periode 2006-2010 cenderung menurun, namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah Tahun 2006 – 2011

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	
2006	57.496	147.719	17,26	22,50
2007	55.100	134.800	16,53	20,29
2008	48.300	122.800	14,14	18,03
2009	43.512	114.722	12,59	16,65
2010	33.726	107.606	9,70	15,52
2011	29.679	135.185	10,77	14,83

2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2006 – 2011 di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi. Dari gambar terlihat bahwa dari tahun 2006 – 2010 indeks kedalaman kemiskinan cenderung menurun yaitu dari 3,64 pada tahun 2006 menjadi 1,55 pada tahun 2010. Sementara itu, pada periode 2010–2011 menunjukkan peningkatan sebesar 0,77.

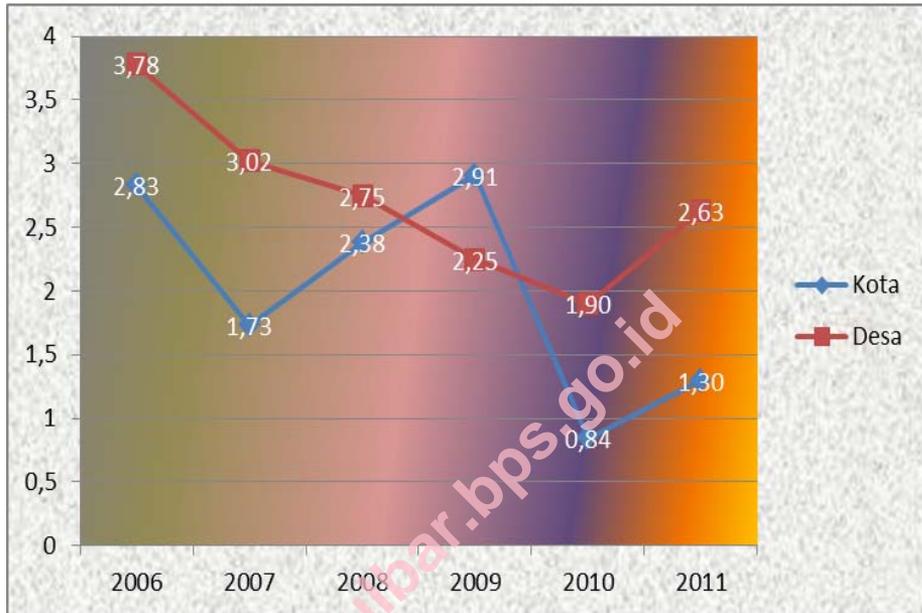
Tabel 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Tahun 2006 – 2011

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	2,83	3,78	3,64
2007	1,73	3,02	2,59
2008	2,38	2,75	2,63
2009	2,91	2,25	2,47
2010	0,84	1,90	1,55
2011	1,30	2,63	2,32

Ditinjau menurut daerah, pada periode yang sama tampak bahwa indeks kedalaman kemiskinan perkotaan lebih fluktuatif bila dibandingkan daerah perdesaan. Pada periode 2006-2010 indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2011 indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 2,63.

Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (kecuali pada tahun 2009). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perdesaan relatif lebih jauh bila dibandingkan dengan di perkotaan.

Gambar 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Tahun 2006 – 2011



2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

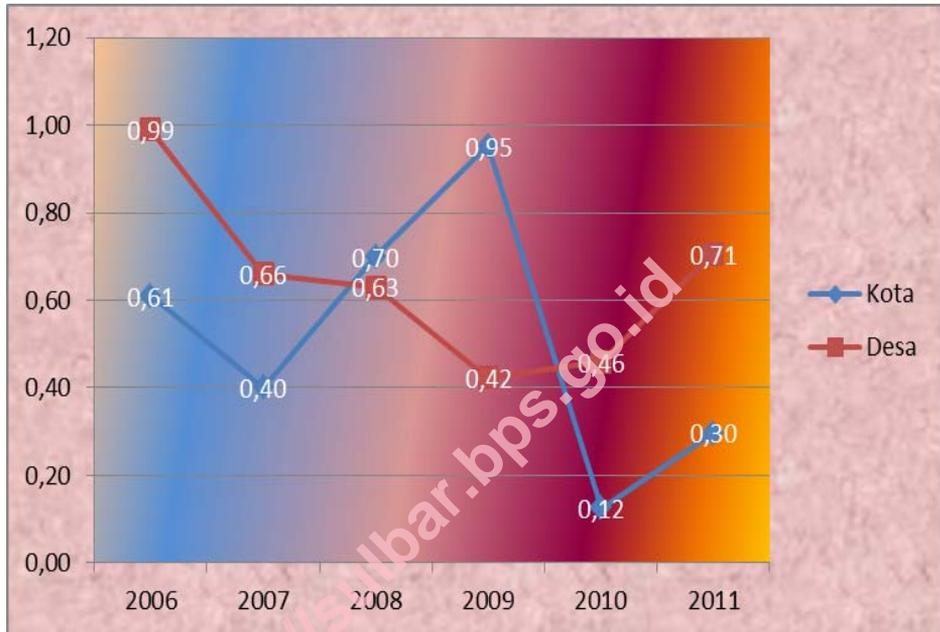
Pada periode 2006-2011 secara umum terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan cenderung menurun dari 0,93 pada tahun 2006 menjadi 0,61 pada tahun 2011. Indeks keparahan kemiskinan ini tampak berfluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada periode 2006-2007 mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2008, lalu pada periode 2008-2010 mengalami penurunan dan akhirnya pada tahun 2011 indeks keparahan kemiskinan meningkat.

Tabel 4
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah
Tahun 2006 – 2011

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	0,61	0,99	0,93
2007	0,40	0,66	0,57
2008	0,70	0,63	0,66
2009	0,95	0,42	0,60
2010	0,12	0,46	0,35
s2011	0,30	0,71	0,61

Selama periode 2006-2011 indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi bila dibandingkan daerah perkotaan kecuali pada tahun 2008 dan 2009 indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di perdesaan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di perkotaan.

Gambar 4
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah
Tahun 2006 – 2011



BAB III
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2006 – 2010

3.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 – 2010. Peningkatan garis kemiskinan terbesar terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar Rp. 90.272,- per kapita per bulan. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene pun mengalami kenaikan garis kemiskinan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 89.411,- per kapita per bulan. Adapun kabupaten lain tidak mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan kedua kabupaten tersebut.

Tabel 5
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten
Tahun 2006 – 2010
(Rp./kapita/bulan)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	130.648	135.568	158.716	204.699	220.059
Polewali Mandar	139.724	140.796	179.438	213.942	229.996
Mamasa	112.763	121.214	149.221	158.068	169.929
Mamuju	118.318	119.031	137.055	147.699	158.782
Mamuju Utara	164.668	166.638	170.212	197.015	211.799

Bila dibandingkan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terlihat bahwa pada tahun 2006, garis kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Mamuju Utara, yaitu Rp. 164.668,- per kapita per bulan. Akan tetapi, seiring

dengan peningkatan garis kemiskinan yang cukup besar pada dua kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, maka pada tahun 2010 garis kemiskinan tertinggi berada pada dua kabupaten yaitu Rp. 220.059,- per kapita per bulan di Kabupaten Majene dan Rp. 229.996,- per kapita per bulan di Kabupaten Polewali Mandar dimana tidak jauh berbeda dengan garis kemiskinan di Kabupaten Mamuju Utara yang sebesar Rp. 211.799,- per kapita per bulan.

3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tabel 6
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2010
(ribu jiwa)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	30,9	30,8	24,4	23,9	27,8
Polewali Mandar	98,1	88,5	78,3	76,6	84,3
Mamasa	31,4	31,0	22,5	22,3	22,8
Mamuju	33,9	30,4	24,7	25,4	27,7
Mamuju Utara	10,9	9,2	7,0	7,1	8,4

Jumlah penduduk miskin pada lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2006-2010 menunjukkan penurunan dimana penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 13,8 ribu jiwa dan terendah di Kabupaten Mamuju Utara sebesar 2,5 ribu jiwa. Bila diamati dari tahun ke tahun selama periode tersebut tampak bahwa tahun 2006-2008 jumlah penduduk miskin pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

menurun, namun pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara mengalami sedikit kenaikan yaitu masing-masing sekitar 700 dan 100 jiwa. Kemudian, pada tahun 2010 seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan.

Sejalan dengan jumlah penduduk miskin, selama periode 2006-2010 persentase penduduk miskin pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat cenderung menurun. Namun demikian, dilihat dari tahun ke tahun pada periode tersebut tampak bahwa Kabupaten Majene dan Mamuju berfluktuatif. Pada tahun 2006-2007 persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami kenaikan dan pada tahun selanjutnya sampai tahun 2009 cenderung menurun. Akan tetapi, pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene kembali mengalami kenaikan. Sedangkan di Kabupaten Mamuju, persentase penduduk miskin pada periode 2006-2008 cenderung mengalami penurunan, tetapi pada periode selanjutnya sampai tahun 2010 terus mengalami kenaikan.

Tabel 7
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	23,50	23,55	18,44	18,09	18,42
Polewali Mandar	27,65	24,96	21,80	21,37	21,24
Mamasa	25,92	25,51	18,06	17,87	16,25
Mamuju	11,96	10,43	8,11	8,13	8,17
Mamuju Utara	11,04	9,22	6,52	6,47	6,20

Dari lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara memiliki persentase penduduk miskin terendah bila dibandingkan tiga kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Selama periode 2006-2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara tidak lebih dari 12 persen bahkan pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Utara mencapai 6,20 persen. Adapun tiga kabupaten lain selalu berada di atas 16 persen dimana pada tahun 2006 Kabupaten Polewali Mandar memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 27,65 persen.

3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Seiring dengan persentase penduduk miskin yang rendah di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, tingkat kedalaman kemiskinan di kedua kabupaten tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan tiga kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan Kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Mamasa.

Indeks kedalaman kemiskinan selama periode 2006-2010 pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun kecuali Kabupaten Majene yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Secara umum selama periode tersebut hanyalah Kabupaten Mamuju yang tampak peningkatan indeks kedalaman kemiskinan yakni dari 1,95 pada tahun 2006 menjadi 2,15 pada tahun 2010. Sementara itu, kabupaten lain memperlihatkan penurunan indeks kedalaman kemiskinan terlebih di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa dimana pada tahun 2006 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 4,81 menjadi 2,81 pada tahun 2010 dan Kabupaten Mamasa pada tahun 2006 sebesar 4,25 menjadi 2,22 pada tahun 2010.

Tabel 8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten
Tahun 2006 – 2010

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	3,75	3,57	3,38	2,74	2,77
Polewali Mandar	4,81	4,40	4,84	3,51	2,81
Mamasa	4,25	4,16	4,48	2,73	2,22
Mamuju	1,95	1,69	2,14	0,99	2,15
Mamuju Utara	2,09	1,39	1,27	0,79	0,91

3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Sejalan dengan tingkat kedalaman kemiskinan pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tingkat keparahan kemiskinan pun menunjukkan angka yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Selama periode 2006 – 2010, secara umum semua kabupaten mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan kecuali Kabupaten Mamuju dimana pada tahun 2006 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,50 naik menjadi 0,84 pada tahun 2010. Adapun kabupaten yang mengalami penurunan yang tinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa yang menurun masing-masing sebesar 0,61 dan 0,59.

Tabel 9
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten
Tahun 2006 – 2010

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	0,89	0,85	0,95	0,66	0,68
Polewali Mandar	1,19	1,14	1,23	0,92	0,58
Mamasa	1,09	1,28	1,42	0,70	0,50
Mamuju	0,50	0,40	0,64	0,22	0,84
Mamuju Utara	0,56	0,29	0,29	0,15	0,22

Pada tahun 2006, indeks keparahan kemiskinan yang rendah berada di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara. Akan tetapi, pada tahun 2010 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mamuju menjadi lebih tinggi dibanding kabupaten lain, sedangkan Kabupaten Mamuju Utara tetap memiliki indeks keparahan kemiskinan yang rendah dibanding kabupaten lain. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Utara memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di kabupaten lain. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah setempat bahwa selain menurunkan angka kemiskinan, perlu diperhatikan pula tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu daerah.

BAB IV
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI
DI PULAU SULAWESI TAHUN 2006 – 2011

4.1. Garis Kemiskinan

Secara umum, garis kemiskinan di Pulau Sulawesi pada periode 2006 – 2011 berfluktuasi. Garis kemiskinan cenderung menurun pada periode 2006-2007 yang dapat dilihat di semua provinsi di Pulau Sulawesi. Akan tetapi, pada periode berikutnya garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 10
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2006 – 2011
(Rp/kapita/bulan)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	184.597	156.550	168.160	184.772	194.334	212.823
Sulawesi Tengah	189.386	154.006	168.025	189.653	203.237	235.512
Sulawesi Selatan	148.584	126.623	138.334	153.715	163.089	179.933
Sulawesi Tenggara	172.995	130.625	141.919	161.583	165.208	181.577
Gorontalo	145.578	138.181	147.154	162.189	171.371	187.215
Sulawesi Barat	153.232	135.242	146.492	163.224	171.356	186.041

Bila dibandingkan antar provinsi di Pulau Sulawesi, pada tahun 2006 garis kemiskinan Provinsi Gorontalo paling rendah, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah paling tinggi. Begitu pula pada tahun 2011, Provinsi

Sulawesi Tengah memiliki garis kemiskinan paling tinggi dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis kemiskinan terendah.

4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Pada periode 2006-2011 tampak bahwa secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi cenderung menurun meskipun ada beberapa provinsi yang fluktuatif. Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan merupakan dua provinsi yang terus menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun selama periode 2006-2011. Adapun provinsi lain pada periode yang sama berfluktuatif dari tahun ke tahun.

Tabel 11
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2006 – 2011
(ribu jiwa)

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	249,36	250,10	223,50	219,60	206,70	194,90
Sulawesi Tengah	553,51	557,40	524,70	489,80	475,00	423,63
Sulawesi Selatan	1.112,00	1.083,40	1.031,70	963,60	913,40	832,91
Sulawesi Tenggara	466,77	465,40	435,90	434,30	400,70	330,00
Gorontalo	273,75	241,90	221,60	224,60	209,90	198,27
Sulawesi Barat	205,21	189,90	171,10	158,20	141,30	164,86

Jumlah penduduk miskin pada periode 2006-2007 di Pulau Sulawesi secara umum menurun, hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang mengalami sedikit peningkatan. Pada periode 2007-2008, semua

provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, pada tahun 2009 Provinsi Gorontalo mengalami sedikit peningkatan, sedangkan provinsi lain tetap turun. Pada tahun 2010 semua provinsi di Pulau Sulawesi kembali menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin, sedangkan pada tahun 2011 hanyalah Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kenaikan.

Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi dari tahun ke tahun pada periode 2006-2011 tidak diikuti oleh persentase penduduk miskin. Pada periode yang sama dari tahun ke tahun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi pada semua provinsi mengalami penurunan kecuali pada tahun 2011, Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen.

Tabel 12
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2006 – 2011

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	11,54	11,42	10,10	9,79	9,10	8,51
Sulawesi Tengah	23,63	22,42	20,75	18,98	18,07	15,83
Sulawesi Selatan	14,57	14,11	13,34	12,31	11,60	10,29
Sulawesi Tenggara	23,37	21,33	19,53	18,93	17,05	14,56
Gorontalo	29,13	27,35	24,88	25,01	23,19	18,75
Sulawesi Barat	20,74	19,03	16,73	15,29	13,58	13,89

Bila dibandingkan antar provinsi, pada tahun 2006 Provinsi Gorontalo memiliki persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi, sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Utara. Begitu pula dengan tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2011, Provinsi Gorontalo memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan terendah di Provinsi Sulawesi Utara.

4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tidak hanya memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi, bila dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Gorontalo pun memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi selama periode 2006-2011. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, Provinsi Sulawesi Utara pun memiliki indeks kedalaman kemiskinan terendah di Pulau Sulawesi pada periode yang sama.

Tabel 13
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2006 – 2011

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	2,48	1,88	1,53	1,55	1,14	1,10
Sulawesi Tengah	4,18	4,46	4,33	4,09	3,09	2,76
Sulawesi Selatan	2,50	2,60	2,44	2,08	1,91	1,65
Sulawesi Tenggara	4,16	4,33	3,74	3,44	3,18	2,61
Gorontalo	6,52	5,57	4,59	4,59	4,14	3,72
Sulawesi Barat	3,64	2,59	2,63	2,47	1,55	2,32

Meskipun memiliki persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari tahun ke tahun pada periode 2006-2011. Berbeda dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi yang berfluktuatif indeks kedalaman kemiskinannya dari tahun ke tahun pada periode yang sama.

4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Sejalan dengan tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi, yaitu 2,19 pada tahun 2006 dan 1,00 pada tahun 2011. Sedangkan yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara dimana nilai indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2006-2011 tidak lebih dari 1.

Tabel 14
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2006 – 2011

Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	0,71	0,47	0,38	0,36	0,24	0,24
Sulawesi Tengah	1,20	1,38	1,41	1,37	0,80	0,75
Sulawesi Selatan	0,61	0,68	0,67	0,55	0,49	0,40
Sulawesi Tenggara	1,21	1,21	1,08	0,98	0,89	0,69
Gorontalo	2,19	1,68	1,27	1,27	1,00	1,00
Sulawesi Barat	0,93	0,57	0,66	0,60	0,35	0,61

Selama periode 2006-2011 tampak bahwa tingkat keparahan kemiskinan cenderung menurun pada semua provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo memiliki penurunan indeks keparahan kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 1,19, sementara yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,21. Meskipun secara umum tingkat keparahan kemiskinan menurun, akan tetapi jika diperhatikan dari tahun ke tahun ada provinsi yang berfluktuasi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

<http://sulbar.bps.go.id>

BAB V

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

5.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga dan rata-rata umur kepala rumah tangga. Ketiga karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin.

Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Akan tetapi, disisi lain tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan minimnya akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Dari tabel 15 tampak bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin sebesar 5,57 orang dan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 4,38 orang.

Dewasa ini semakin merebak isu mengenai kesetaraan gender dalam menghadapi kemajuan pembangunan dan teknologi informasi yang semakin pesat. Akibatnya, mulai bergulir berbagai tuntutan dan kebijakan dalam menyikapi isu tersebut. Secara umum peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akan mengalami banyak kendala dibanding peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tabel 15 dan 16 menunjukkan bahwa persentase wanita sebagai kepala rumah tangga di daerah perkotaan pada rumah tangga miskin sangat tinggi yaitu 23,15 persen bila dibandingkan dengan yang lainnya yang nilainya tidak lebih dari 15 persen. Hal ini mengindikasikan kecenderungan wanita miskin di

perkotaan untuk berperan ganda dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya.

Tabel 15
Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	5,53	4,81
- Perdesaan (D)	5,58	4,25
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	5,57	4,38
2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	23,15	14,06
- Perdesaan (D)	10,07	14,69
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	11,99	14,55
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	46,69	45,01
- Perdesaan (D)	43,28	44,92
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	43,78	44,94

Di daerah perdesaan, wanita sebagai kepala rumah tangga lebih banyak ditemukan pada rumah tangga tidak miskin daripada rumah tangga miskin yaitu sebesar 14,69 persen pada rumah tangga tidak miskin dan 10,07 persen pada rumah tangga miskin. Secara umum, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin sebesar 11,99 persen dan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 14,55 persen.

Tabel 15 menunjukkan bahwa rata-rata umur kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin lebih rendah dari rumah tangga tidak miskin, yaitu sebesar 43,28 tahun pada rumah tangga miskin dan 44,92 tahun pada rumah tangga tidak miskin. Angka ini digunakan untuk melihat distribusi umur dan produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, meskipun hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu linier karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan.

Tabel 16
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	76,85	23,15
- Perdesaan (D)	89,93	10,07
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	88,01	11,99
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	85,94	14,06
- Perdesaan (D)	85,31	14,69
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	85,45	14,55

5.2. Karakteristik Pendidikan

Pendidikan sangat berperan dalam mempengaruhi kemiskinan suatu rumah tangga. Orang yang mempunyai pendidikan yang lebih baik berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terlepas dari ancaman kemiskinan.

Tabel 17
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis
Kepala Rumah Tangga Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Huruf Latin	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat Membaca dan Menulis
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	50,35	42,66	6,98
- Perdesaan (D)	70,21	5,43	24,36
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	67,29	10,91	21,80
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	63,72	24,26	12,01
- Perdesaan (D)	72,15	13,36	14,49
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	70,23	15,84	13,93

Kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin yang tergolong buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin maupun lainnya) sebesar 21,80 persen dan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 13,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan membaca dan menulis pada rumah tangga miskin lebih rendah bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Ditinjau menurut daerah, angka buta huruf kepala rumah tangga di perdesaan lebih tinggi bila dibandingkan daerah perkotaan.

Tabel 18 menunjukkan bahwa persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan tamat SD lebih tinggi pada rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin. Akan tetapi, pada pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi persentase kepala rumah

tangga pada rumah tangga miskin lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah.

Tabel 18
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	80,90	4,61	6,79	7,71	0,00
- Perdesaan (D)	38,65	39,55	11,06	9,83	0,90
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	45,41	33,96	10,37	9,49	0,76
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	20,48	24,42	9,97	26,29	18,84
- Perdesaan (D)	34,99	35,39	13,54	12,24	3,84
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	31,72	32,91	12,73	15,41	7,23

Di daerah perkotaan, persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat SD sangatlah tinggi yaitu sebesar 80,90 persen, untuk tamat SD sebesar 4,61 persen, SLTP sebesar 6,79 persen, SLTA sebesar 7,71 persen dan tidak ada kepala rumah tangga yang pendidikannya hingga Perguruan Tinggi. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin kepala rumah tangga yang tidak tamat SD sebesar 20,48 persen, tamat SD 24,42 persen, SLTP 9,97, SLTA 26,29 persen dan Perguruan Tinggi 18,84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir kepala

rumah tangga semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut menjadi miskin.

Sedangkan di daerah perdesaan, persentase pendidikan terakhir kepala rumah tangga menurut tidaklah begitu terlihat perbedaan yang signifikan antara masing-masing jenjang pendidikan. Akan tetapi, dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan yang lebih rendah dari rumah tangga tidak miskin.

5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Tabel 19
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Pertani an	Industri	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	0,00	79,53	6,98	13,48
- Perdesaan (D)	0,00	85,01	10,14	4,85
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	0,00	84,20	9,68	6,12
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	7,34	25,30	1,05	66,31
- Perdesaan (D)	4,81	70,35	4,68	20,16
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	5,39	60,10	3,86	30,66

Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat sangat mengandalkan sektor pertanian. Pada rumah tangga miskin kepala rumah tangga yang memilih lapangan usaha pertanian sebesar 84,20 persen sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 60,10 persen. Selain itu, pada rumah tangga miskin kepala rumah tangga semuanya bekerja, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin ada sebesar 5,39 persen kepala rumah tangga yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin berusaha terus bekerja dengan jenis pekerjaan apapun seperti pekerja pertanian sedangkan pada rumah tangga tidak miskin masih memiliki tabungan yang mereka miliki untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Ada indikasi kuat bahwa mereka yang berstatus pengusaha akan memiliki tingkat

kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai apalagi sampai pekerja bebas.

Tabel 20
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	1-2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	0,00	92,83	0,00	7,17	0,00
- Perdesaan (D)	0,00	83,14	1,51	9,61	5,74
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	0,00	84,57	1,29	9,25	4,89
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	7,34	50,73	2,30	39,63	0,00
- Perdesaan (D)	4,81	65,76	4,62	19,12	5,68
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	5,39	62,35	4,10	23,78	4,39

Keterangan :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas

Sebagian besar kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yaitu sebesar 84,57 persen, demikian pula pada rumah tangga tidak miskin yakni sebesar 62,35 persen. Karena sebagian besar bekerja di sektor pertanian, kemungkinan kepala rumah tangga tersebut bekerja sendiri ataupun dibantu oleh anggota keluarga sendiri yang tidak mendapatkan upah/bayaran.

Kepala rumah tangga berstatus buruh/karyawan/pegawai sangat banyak ditemukan di daerah perkotaan pada rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 39,63 persen. Kemungkinan kepala rumah tangga tersebut bekerja sebagai pegawai negeri ataupun karyawan pada usaha perdagangan yang memiliki gaji/upah yang tetap sehingga tidak terancam untuk menjadi miskin.

5.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)

5.4.1. Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi dalam tempat tinggal yang tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapita minimal $8 m^2$.

Tabel 21
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m^2) Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	< 8	8 -15	>15
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	18,38	81,62	0,00
- Perdesaan (D)	54,83	39,59	5,58
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	49,46	45,78	4,76
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	12,83	47,15	40,02
- Perdesaan (D)	20,27	40,50	39,23
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	18,58	42,01	39,41

Pada rumah tangga miskin sebagian besar rumah memiliki luas lantai per kapita kurang dari 8 m² yaitu sebesar 49,46 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 18,58 persen. Sedangkan rumah yang memiliki luas lantai per kapita 8-15 m² pada rumah tangga miskin sebesar 45,78 dan rumah tangga tidak miskin sebesar 42,01. Pada rumah tangga tidak miskin persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita lebih dari 15 m² cukup besar yaitu 39,41 persen, sedangkan pada rumah tangga miskin hanya 4,76 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin cenderung tidak memiliki keleluasaan pribadi dalam tempat tinggal.

Namun demikian, kecenderungan tersebut tidak berlaku pada rumah tangga miskin di daerah perkotaan. Tabel 21 menggambarkan bahwa pada rumah tangga miskin di perkotaan rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 8 m² hanya sebesar 18,38 persen, sedangkan selebihnya mempunyai luas lantai per kapita 8-15 m².

Sementara itu, pada rumah tangga tidak miskin persentase luas lantai per kapita hampir sama baik perdesaan maupun perkotaan dimana sebagian besar rumah tangga mempunyai luas lantai per kapita lebih dari 8 m² yang memenuhi standar keleluasaan pribadi dalam tempat tinggal.

5.4.2. Jenis Lantai

Dari tabel 22 tampak bahwa jenis lantai dari tanah lebih banyak digunakan oleh rumah tangga miskin daripada rumah tangga tidak miskin dimana rumah tangga miskin sebesar 17,27 persen dan rumah tangga tidak miskin hanya sebesar 4,65persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis lantai terluas dari tanah merupakan pilihan bagi rumah tangga miskin sebagai bentuk ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 22
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	100,00	0,00
- Perdesaan (D)	79,74	20,26
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	82,73	17,27
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	97,84	2,16
- Perdesaan (D)	94,61	5,39
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	95,35	4,65

Pada rumah tangga tidak miskin, jenis lantai terluas yang digunakan sama baik di daerah perkotaan maupu perdesaan dimana sebagian besar menggunakan lantai bukan tanah. Sementara pada rumah tangga miskin, di daerah perkotaan semuanya menggunakan lantai terluas bukan tanah dan di perdesaan lantai terluas dari tanah masih banyak digunakan yaitu sebesar 20,26 persen. Tingginya pemakaian lantai terluas dari tanah pada rumah tangga miskin sangat dipengaruhi oleh lantai terluas dari tanah pada rumah tangga perdesaan.

5.4.3. Jenis Atap

Pada rumah tangga miskin tidak ada yang menggunakan jenis atap terluas dari beton, genteng dan sirap. Masyarakat lebih banyak menggunakan jenis atap seng/asbes baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin yaitu masing-masing sebesar 60,23 persen dan 70,58 persen. Sementara penggunaan jenis atap dari ijuk/rumbia dan lainnya lebih banyak pada rumah tangga miskin dibanding rumah tangga tidak miskin.

Tabel 23
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Beton/ Genteng /Sirap	Seng/ Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	0,00	84,67	15,33	0,00
- Perdesaan (D)	0,00	56,01	33,47	10,52
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	0,00	60,23	30,80	8,97
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	3,40	79,90	14,87	1,84
- Perdesaan (D)	5,30	67,84	24,24	2,63
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	4,87	70,58	22,11	2,45

Tabel 23 menunjukkan bahwa pada rumah tangga miskin di perdesaan rumah tangga yang menggunakan ijuk/rumbia masih cukup besar yaitu sebesar 33,47 persen, seng/asbes 56,01 persen dan lainnya 10,52 persen. Penggunaan ijuk/rumbia yang masih cukup besar pada rumah tangga miskin khususnya di daerah perdesaan menunjukkan salah satu

profil rumah tangga miskin. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan nilai-nilai sosio-kultural yang masih melekat pada masyarakat sehingga menggunakan jenis atap tersebut

5.4.4. Jenis Dinding

Di daerah perkotaan, rumah tangga miskin yang menggunakan tembok sebagai jenis dinding terluas yaitu sebesar 64,19 persen. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 42,95 persen. Pada rumah tangga tidak miskin, lebih banyak menggunakan kayu sebagai jenis dinding terluas, meskipun nilainya tidak jauh berbeda dengan penggunaan tembok yaitu sebesar 49,33 persen.

Tabel 24
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	64,19	28,83	0,00	6,98
- Perdesaan (D)	4,75	80,84	7,90	6,51
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	13,50	73,18	6,74	6,58
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	42,95	49,33	1,07	6,65
- Perdesaan (D)	26,82	65,02	3,63	4,53
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	30,49	61,45	3,05	5,01

Sementara itu, di daerah perdesaan pada rumah tangga miskin sebagian besar menggunakan jenis dinding terbuat dari kayu, begitupun dengan rumah tangga tidak miskin. Akan tetapi, rumah tangga miskin lebih banyak menggunakan kayu sebagai dinding terbuat daripada rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 80,84 persen pada rumah tangga miskin dan 65,02 persen pada rumah tangga tidak miskin. Penggunaan bambu dan lainnya pun lebih banyak ditemukan pada rumah tangga miskin daripada rumah tangga tidak miskin.

Secara umum, penggunaan tembok sebagai jenis dinding terbuat lebih banyak pada rumah tangga tidak miskin daripada rumah tangga miskin. Akan tetapi, pada jenis dinding terbuat lainnya seperti kayu, bambu dan lainnya lebih banyak pada rumah tangga miskin daripada rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin cenderung menggunakan dinding dengan kualitas yang lebih rendah dibanding rumah tangga tidak miskin.

5.4.5. Sumber Penerangan

Berdasarkan sumber penerangan rumah terlihat bahwa pada rumah tangga miskin cenderung menggunakan penerangan non listrik seperti pelita, obor, sentir dan lainnya yaitu sebesar 48,62 persen, sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebagian besar menggunakan listrik PLN sebesar 48,92 persen. Hal ini menunjukkan profil rumah tangga miskin yang cenderung menggunakan non listrik sebagai sumber penerangan.

Penggunaan listrik non PLN di daerah perdesaan pada rumah tangga miskin cukup tinggi yaitu sebesar 43,17 persen, yang tidak jauh berbeda dengan penggunaan non listrik sebagai sumber penerangan yaitu sebesar 46,82 persen. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan listrik PLN yang belum menjangkau semua wilayah perdesaan sehingga masyarakat cenderung menggunakan listrik non PLN yang dimiliki secara pribadi oleh

perorangan. Sementara itu, rumah tangga miskin di daerah perkotaan tidak ada yang menggunakan listrik non PLN.

Tabel 25
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Non Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	40,93	0,00	59,07
- Perdesaan (D)	10,01	43,17	46,82
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	14,57	36,81	48,62
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	86,52	3,22	10,25
- Perdesaan (D)	37,85	37,42	24,91
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	48,92	29,64	21,58

Pada rumah tangga tidak miskin, di daerah perkotaan 86,52 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN, sangat sedikit yang menggunakan listrik non PN yaitu sebesar 3,22 persen dan selebihnya 10,25 persen menggunakan non listrik. Di daerah perdesaan, penggunaan listrik sebagai sumber penerangan masih mendominasi baik listrik PLN maupun non PLN yaitu masing-masing 37,85 persen dan 37,42 persen serta selebihnya menggunakan non listrik.

5.4.6. Sumber Air Minum

Indikator perumahan lain yang dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah adalah ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Air bersih yang dimaksud adalah air yang berseumber dari air kemasan, air ledeng/PAM, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Tabel 26
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Air Bersih*)	Lainnya**)
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	96,05	3,95
- Perdesaan (D)	30,98	69,02
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	40,56	59,44
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	91,85	8,15
- Perdesaan (D)	49,31	50,69
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	58,98	41,02

Keterangan :

*) Air Bersih meliputi : air kemasan, air ledeng/PAM, sumur dan mata air terlindung.

*) Lainnya meliputi : sumur dan mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan dan lain-lain.

Pada rumah tangga miskin, di daerah perkotaan sebagian besar rumah tangga menggunakan air bersih yaitu sebesar 96,05 persen, sedangkan di daerah perdesaan pemakaian air bersih hanya sebesar 30,98

persen. Pada rumah tangga tidak miskin, di daerah perkotaan pun sebagian besar menggunakan air bersih yaitu 91,85 persen, sementara itu di daerah perdesaan hanya 49,31 persen yang menggunakan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan air bersih juga didukung oleh ketersediaan sarana air bersih yang memadai, misalnya PDAM sebagai perusahaan air minum terbesar belum menyentuh sampai ke pelosok.

Secara umum, penggunaan air bersih sebagai sumber air minum lebih banyak digunakan oleh rumah tangga tidak miskin dibanding rumah tangga miskin, yaitu sebesar 58,98 persen pada rumah tangga tidak miskin dan 40,56 persen pada rumah tangga miskin. Selain ketersediaan sarana air bersih, faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi adalah kemampuan rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi ketersediaan air bersih di rumah tangga tersebut.

5.4.7. Fasilitas Jamban

Fasilitas lain yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam mendukung pola hidup sehat adalah ketersediaan jamban. Selain ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dibedakan atas jamban sendiri, bersama dan umum/tidak ada.

Sebagian besar rumah tangga fasilitas jamban yang digunakan umum atau tidak menggunakan jamban, ini berlaku baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Akan tetapi, pada rumah tangga miskin persentasenya lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin yaitu sebesar 70,40 persen pada rumah tangga miskin dan 49,86 persen pada rumah tangga tidak miskin. Tingginya angka tersebut khususnya pada rumah tangga miskin menunjukkan rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga.

Tabel 27
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Bersama	Umum/ Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	16,16	13,50	70,34
- Perdesaan (D)	22,82	6,77	70,40
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	21,84	7,76	70,40
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	63,67	12,27	24,06
- Perdesaan (D)	35,72	6,83	57,45
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	42,08	8,06	49,86

Tingginya persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yaitu masing-masing 70,34 persen dan 70,40 persen. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, di daerah perkotaan sebagian besar menggunakan fasilitas jamban milik sendiri yaitu 63,67 persen dan di daerah perdesaan rumah tangga lebih banyak menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban.

5.4.8. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah dibedakan atas rumah sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya. Distribusi persentase pemilikan rumah hampir sama baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin dimana sebagian besar rumah tangga memiliki rumah sendiri yaitu 88,48 persen pada rumah tangga miskin dan 85,68 persen pada rumah tangga tidak miskin. Pemilikan bebas sewa menempati urutan kedua setelah pemilikan rumah sendiri, yaitu

9,12 persen pada rumah tangga miskin dan 8,42 persen pada rumah tangga tidak miskin. Sementara untuk pemilikan kontrak/sewa dan lainnya hanya sedikit, yaitu tidak lebih dari 6 persen.

Tabel 28
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Tahun 2011

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	86,50	13,50	0,00	0,00
- Perdesaan (D)	88,82	0,00	10,70	0,48
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	88,48	1,99	9,12	0,41
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	82,79	8,40	5,51	3,31
- Perdesaan (D)	86,54	0,28	9,27	3,91
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	85,68	2,13	8,42	3,78

Pada rumah tangga miskin, pemilikan rumah sendiri mendominasi di daerah perkotaan dan selanjutnya adalah pemilikan kontrak/sewa sebesar 13,50 persen. Sementara itu, pemilikan kontrak/sewa tidak ditemukan pada rumah tangga miskin di perdesaan, selain rumah sendiri yang ada hanyalah bebas sewa baik yang berasal dari rumah keluarga ataupun orang lain. Hal ini dimungkinkan karena nilai rumah yang belum komersial untuk daerah perdesaan sehingga dibebassewakan pun tidak menjadi persoalan bagi pemilik rumah, terlebih untuk rumah tangga miskin yang membutuhkan. Sementara di daerah perkotaan, nilai rumah sudah mulai komersial sehingga rumah yang dibebassewakan sudah tidak ada, sekalipun kepada rumah tangga miskin.

Berbeda pada rumah tangga miskin, rumah tangga tidak miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan rumah tangga ada yang menempati rumah kontrak/sewa dan bebas sewa. Hal ini dimungkinkan karena nilai rumah yang ditempati oleh rumah tangga tidak miskin lebih tinggi sehingga memungkinkan pemiliknya untuk menyewakan/mengontrakkan rumah tersebut. Sementara di daerah perkotaan, rumah yang dibebassewakan kemungkinan adalah rumah orang tua/famili.

<http://sulbar.bps.go.id>

Data

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sulbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Jl. RE. Martadinata No. 10 Mamuju
Tlp. (0426) 2703340 Fax. (0426) 22103

Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>